

## BAB IV

### UPAYA PEMERINTAH THAILAND MENANGGULANGI PERDAGANGAN MANUSIA

Perdagangan manusia yang terjadi di Thailand bukan merupakan kasus baru, melainkan kasus yang sudah lama terjadi. Tindakan kriminal ini tidak mudah untuk diberantas begitu saja. Pemerintah Thailand jelas membutuhkan cara-cara yang efektif untuk menanggulangi hal tersebut. Dengan pelaku dan korban yang tersebar di berbagai tempat, serta banyaknya bentuk dan motif perdagangan manusia yang terjadi, pemerintah Thailand membutuhkan tindakan internal dan eksternal.

#### A. Upaya Internal Yang Dilakukan Pemerintah Thailand

##### 1. Pembuatan Undang-Undang Terkait Perdagangan Manusia

Pada bulan Juni 2008, Thailand telah mengesahkan Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia (B.E.2551/2008).<sup>1</sup> Disamping undang-undang ini, ada pula beberapa peraturan lainnya yang menyatakan kriminalisasi terhadap semua aktivitas terkait perdagangan manusia.

Antara lain sebagai berikut :

##### a. *Immigration Act* (1979)

---

<sup>1</sup> SIREN Mekong Region Country Datasheet Human Trafficking : *Thailand Human Trafficking Datasheet* dalam [http://www.no-trafficking.org/reports\\_docs/siren/uniap\\_2010ht\\_datasheets.pdf](http://www.no-trafficking.org/reports_docs/siren/uniap_2010ht_datasheets.pdf) diakses tanggal 11 Januari 2014

- b. *Amandements to the Securities and Exchange Act (1992)*
- c. *Prevention and Suppression of Prostitution Act (1996)*
- d. *Criminal Procedure Amdement Act (1997)*
- e. *Penal Code Amdement Act (1997)*
- f. *Anti Money Laundering Act (1999)*
- g. *Child Protection Act (2003)*
- h. *Labour Protection Act (2008)*

Peraturan-peraturan ini memberikan sanksi yang berat bagi pihak yang didakwa melakukan perbuatan yang terkait dengan prostitusi, pengeksploitasian buruh, pengeksploitasian pengemis, dan perbuatan yang tak manusiawi lainnya.

## **2. Pemberian Perlindungan Terhadap Korban Perdagangan Manusia**

Bagian pertama dalam operasi penyelamatan, fase awal identifikasi korban dilakukan di TKP. Korban yang menunjukkan tanda-tanda mengalami kekerasan fisik, penyiksaan, trauma, atau ketakutan di bawa keluar dari tempat tersebut. Begitu pula dengan korban yang mengaku ditipu atau dibujuk untuk bekerja disana.

Selanjutnya dilakukan wawancara investigasi terhadap korban di kantor polisi atau di tempat perlindungan. Kementerian Sosial dan Perlindungan Manusia Thailand juga ikut berperan aktif dalam proses identifikasi ini. Pada tahun 2000, lima dan anak identifikasi korban

telah dikembangkan bagi petugas pemerintah untuk membantu proses identifikasi ini.

Bagian kedua adalah orang-orang yang telah teridentifikasi sebagai korban perdagangan manusia ditempatkan dalam sebuah rumah perlindungan. Kemudian, petugas melakukan pemeriksaan kesehatan fisik dan mental korban. Selama disana, korban diberikan pelayanan kesehatan, hiburan, pendidikan, dan pelatihan mata pencaharian. Mereka juga disiapkan untuk dipulangkan kembali dan membaaur ke dalam masyarakat. Proses pemulangan ini juga akan dievaluasi.

Bagi korban yang merupakan penduduk asli Thailand, setelah diselamatkan dalam operasi yang dilakukan di luar negeri, setibanya di Bangkok, tim gabungan Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, dan Kepolisian Thailand melakukan wawancara dan pemeriksaan kesehatan fisik dan mental. Jika hasil identifikasi positif, akan diberikan bantuan selanjutnya.

Bagian ketiga merupakan pemberian bantuan lanjutan. Pemerintah Thailand telah mengembangkan standar prosedur operasi dengan pemerintah Laos dan Kamboja untuk proses pemulangan dan pengintegrasian korban. Prosedur meliputi pemulangan ke negara asal dari tempat perlindungan, pendeportasian di titik-titik imigrasi, pemindahan ke organisasi lain untuk mendapatkan bantuan selanjutnya, dan penanganan korban yang meninggalkan tempat perlindungan tanpa izin

### **3. Penegakan Hukum Terkait Perdagangan Manusia (Penuntutan)**

Thailand telah membangun unit khusus bernama *Anti-Human Trafficking Division* di lingkungan Kepolisian Thailand pada tahun 2006. Unit ini hanya berfokus pada kasus perdagangan manusia. Kantor Kejaksaan Thailand juga memiliki unit yang bernama *Centre Against International Human Trafficking*. Unit ini bertanggung jawab dalam penuntutan kasus-kasus perdagangan manusia. Untuk kasus-kasus perdagangan manusia yang dianggap sebagai 'kasus spesial', *Department of Special Investigations* di bawah Kementerian Kehakiman akan ikut serta menangani.

### **4. Melakukan Kerjasama Dengan Agensi Pemerintah Thailand**

Sebagai tindakan internal yang dilakukan oleh pemerintah Thailand, kerjasama dengan agensi pemerintahan sangat dibutuhkan untuk membantu dan mendukung tindakan pemerintah untuk menanggulangi perdagangan manusia. Banyak agensi pemerintahan yang *concern* dengan perdagangan manusia. Salah satunya adalah *Department of Social Development and Welfare (DSDW)*.

Departemen ini memberikan pelayanan kesejahteraan untuk masyarakat. Dalam kaitannya dengan perdagangan manusia, agensi ini juga fokus terhadap anak-anak dan wanita. Anak-anak yang berumur dari lahir hingga 18 tahun yang berada pada kondisi tuna wisma keluarga miskin perilaku yang tidak pantas ditinggalkan orang tua

disalahgunakan, dieksploitasi secara ilegal, dan lainnya, akan mendapatkan penanganan atau pengembangan hidup yang lebih layak dan normal, serta secara kualitas lebih baik.<sup>2</sup>

Beberapa cara yang dilakukan oleh *Department of Social Development and Welfare* milik pemerintah Thailand untuk pelayanan terhadap anak-anak adalah perlindungan/pengembangan di rumah sosial, pelatihan keterampilan, pemberian pengetahuan, pemberian perawatan kesehatan, rehabilitasi, pemberian pengawasan dan perhatian di tempat penampungan sosial, dan lainnya.

Sama halnya dengan anak-anak, wanita yang berada dalam kondisi yang tidak layak juga mendapatkan pelayanan serupa. Mereka diberikan bantuan dan juga diberikan peningkatan kualitas. Untuk wanita yang menjadi korban kejahatan atau eksploitasi, disediakan tempat untuk rehabilitasi dan tempat perlindungan. Tidak hanya itu, wanita yang hidup dengan HIV juga diberikan pelayanan untuk tetap bersosialisasi dan layanan kesehatan. Saat ini tempat perlindungan dan pengembangan milik departemen ini berada di daerah Ratchasima, Phitsanulok, Surathani, dan Nothaburi.<sup>3</sup>

Penyediaan panti asuhan untuk anak-anak juga merupakan bagian dari pelayanan *Department of Social Development and Welfare*. Dalam

---

<sup>2</sup> *Children and Youth Service Department* dalam [http://164.115.30.7/dsdw2011/module.php?module=service&pg=servicedetail&ser\\_id=1](http://164.115.30.7/dsdw2011/module.php?module=service&pg=servicedetail&ser_id=1) diakses tanggal 9 April 2014

<sup>3</sup> *Women's Service Department* dalam [http://164.115.30.7/dsdw2011/module.php?module=service&pg=servicedetail&ser\\_id=2](http://164.115.30.7/dsdw2011/module.php?module=service&pg=servicedetail&ser_id=2) diakses

panti asuhan yang disediakan, terdapat beberapa hal spesifik yang berkaitan dengan mutu dan kualitas untuk anak-anak yang tinggal. Contohnya adanya pengasuh atau perawat yang baik, pemberian tempat (kamar) yang layak, pemberian pakaian dan kebutuhan anak-anak, dan lainnya. Pelatihan-pelatihan untuk anak juga dilakukan, diantaranya adalah pelatihan kejuruan, pelatihan etika dalam keluarga, *outbound*, kegiatan keagamaan, dan lainnya.

Sementara itu, program untuk wanita lebih fokus kepada aspek keterampilan. Untuk itu DSDW memberikan pelatihan kerja dan karir di tempat perlindungan mereka, diantaranya adalah menjahit, memasak, layanan jasa (untuk perhotelan, salon, perkantoran), bahasa asing, pendidikan dasar, dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan agar wanita yang berada di tempat perlindungan dapat beraktivitas dan dapat bekerja sesuai dengan minat mereka. Adanya pelatihan tersebut membantu wanita binaan DSDW untuk berkembang dan bangkit dari kondisi di waktu lampau.

Dengan adanya kerjasama dengan DSDW, pemerintah Thailand mampu mengatasi sedikit demi sedikit korban eksploitasi, baik anak-anak maupun wanita, yang merupakan bagian dari perdagangan manusia. Pemerintah Thailand juga lebih mampu untuk mengatasi persoalan-

## 5. Melakukan Kerjasama Dengan Organisasi Non-Pemerintah di Thailand

Kerjasama dengan organisasi non-pemerintah dilakukan untuk membantu pemerintah Thailand dalam mengedukasi masyarakat tentang perdagangan manusia. Selain itu organisasi non-pemerintah juga dapat membantu dalam usaha perlindungan korban tindak kriminal ini. salah satu organisasi non-pemerintah yang ada di Thailand adalah *Mekong Region Law Center* (MRLC).

MRLC merupakan organisasi nirlaba dari ahli hukum Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam yang terbentuk pada Konfrensi Pembangunan Hukum di Chiang Mai bulan September 1992.<sup>4</sup> Tujuan dari didirikannya MRLC adalah untuk mempromosikan aturan hukum, mendorong pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan, dan memfasilitasi proses pembangunan hukum di *Mekong Region*. Misi dari MRLC adalah meningkatkan pendidikan hukum, memperkuat kapasitas hukum, mendorong sikap saling melengkapi hukum, dan menciptakan pendekatan regional untuk pemecahan masalah.

*Mekong Region Law Center* saat ini merupakan salah satu bagian dari ASEAN *Centers of Excellence* (COEs) yang membantu untuk

<sup>4</sup> MRLC dan "Si Putih" adalah "Mekong Region Law Center" yang didirikan pada tanggal 9 April

mengembangkan sumber daya manusia. Tujuan dari MRLC diantaranya adalah :<sup>5</sup>

1. Untuk mempromosikan kesadaran publik tentang hak dan tanggung jawab hukum dan untuk mendorong rasa hormat pada semua tingkat masyarakat untuk penegakan hukum.
2. Untuk meningkatkan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi di dalam daerah dan menarik investasi ke daerah.
3. Untuk membantu dan berkontribusi dalam proses pembangunan hukum di daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, MRLC melakukan beberapa hal seperti :<sup>6</sup>

1. Merancang dan mengimplementasikan program-program untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu hukum, termasuk yang berkaitan dengan investasi, perdagangan internasional, hak asasi manusia, administrasi peradilan, dan pembangunan sosial ekonomi.
2. Menyediakan sarana untuk meningkatkan dan mempromosikan pengetahuan dan ketrampilan pejabat pemerintah, pengacara swasta dan publik, instruktur hukum, hakim, arbiter, dan orang-orang terkait lainnya di daerah Mekong.

---

<sup>5</sup> MRLC Goal dalam <http://www.mekonglawcenter.org/index.asp.htm> diakses tanggal 9 April 2014



3. Memfasilitasi dan mendukung penelitian hukum tentang isu-isu yang relevan dengan pengembangan hukum di daerah.
4. Bertindak sebagai media untuk pertukaran pengetahuan hukum dan berbagi pengalaman yang relevan dalam daerah dan antara orang-orang di daerah, serta sumber-sumber di luar daerah.

*Mekong Region Law Center* juga memiliki program yang dicanangkan. Program yang ada dalam organisasi ini dilakukan dalam empat bidang hukum, yakni bisnis dan hukum perdagangan internasional, hukum manajemen lingkungan dan sumber daya, hukum internasional, serta hak asasi manusia dan admisitirasi hukum. Selain itu, MRLC juga memiliki agenda yang terkait dengan bidang hukum. Dua diantaranya adalah *One Week Training Workshop on "An Introduction to Laws Concerning Investment" for officers, lawyers, and/or interpreneurs from Lao PDR* dan *The Software Development in The Mekong Basin Project* (yang rencananya berkolaborasi dengan Cina, Jepang, dan Korea Selatan melalui ASEAN +3, sesuai dengan hasil negosiasi pemerintah Thailand).<sup>7</sup>

Dengan adanya kerjasama dengan MRLC, pemerintah Thailand mendapatkan manfaat yaitu adanya bantuan hukum dan pengembangan hukum dari advokat di wilayah *Mekong Region* yang dapat digunakan

<sup>7</sup> MRLC Upcoming Activities dalam [http://www.mekonglawcenter.org/index\\_current.htm](http://www.mekonglawcenter.org/index_current.htm) diakses

sebagai masukan untuk pembuatan undang-undang, aturan hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan peradilan terhadap perdagangan manusia.

## **6. Melakukan Kerjasama Dengan Institusi Akademik dan Masyarakat Sipil**

Kerjasama dengan institusi akademik dan masyarakat sipil diperlukan oleh pemerintah Thailand untuk memberikan informasi terkait perdagangan manusia yang sudah menjadi masalah global. Akademisi dan masyarakat memiliki peran dalam upaya penanggulangan pemerintah terhadap perdagangan manusia di Thailand. Salah satu institusi akademik Thailand yang memiliki andil dalam pemberian informasi terhadap perdagangan manusia adalah Chulalongkorn University.

Chulalongkorn University memiliki pusat penelitian untuk migrasi atau lebih dikenal dengan sebutan *Asia Research Center for Migration* (ARCM). Pusat penelitian ini didirikan pada 1 Januari 1995 dengan tujuan pemantauan, pengumpulan data, melakukan penelitian, dan memberikan rekomendasi kebijakan dan layanan yang terkait dengan pemerintah, non-pemerintah, dan sektor swasta pada tren lintas batas di Asia Tenggara, khususnya Thailand.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Who Are We* dalam <http://www.asiamigration.com/index.php> diakses tanggal 6 April 2014

ARCM memiliki beberapa proyek yang dijalankan setiap tahunnya. Berikut ini adalah proyek-proyek yang sudah dijalankan oleh ARCM pada tahun 2011 hingga 2014.<sup>9</sup>

- a. *The Study of Population Migration Issues Affecting ASEAN Security* yang dilaksanakan pada 01/09/2013 hingga 28/02/2014.
- b. *Best Practice in The Treatment of Migrant Workers in The Seafood Industry of Thailand* yang dilaksanakan pada 01/04/2013 hingga 31/08/2013.
- c. *Study on Employment and Working Conditions in Thailand's Commercial Fishing Sector* yang dilaksanakan pada 01/04/2012 hingga 30/09/2012.
- d. *The Characteristics of Employment in Marine Fishing Business Continuity of Thailand* yang dilaksanakan pada 01/12/2012 hingga 31/05/2013.
- e. *Formative Research Using Reproductive Health Services Who Escape The Battle of Myanmar Refugees in The Refugee Camps in Thailand* yang dilaksanakan pada 01/10/2012 hingga 31/12/2012.
- f. *An Assessment of Complaint Mechanism to Address Grievance in The Recruitment of Inbound and Outbound Migrant Workers*

<sup>9</sup> ARCM Project dalam <http://www.aramthailand.com/projects.php>, diakses tanggal 6 April 2014.

*in Thailand* yang dilaksanakan pada 01/09/2011 hingga 30/04/2012.

- g. *The Crisis-Responding Social Policies and Their Impact on The Poor and Vulnerable Groups* yang dilaksanakan pada 01/01/2011 hingga 30/06/2011.
- h. *The Protection of Migrant Workers and The Prevention of Labor Exploration Including Human Trafficking* yang dilaksanakan pada 01/01/2011 hingga 31/10/2011.

Selain Proyek-proyek di atas, ARCM juga memiliki beberapa agenda yang terkait dengan riset dan pengkajian tentang migrasi dan *human trafficking*. Hal ini merupakan cara bagi ARCM untuk memberikan pengetahuan dan menggali lebih dalam tentang perpindahan penduduk lintas batas. Berikut ini adalah beberapa agenda ARCM pada tahun 2012-2014.<sup>10</sup>

- a. *Consultative National Expert Workshop : Migrant Worker Administration* tanggal 12 April 2014.
- b. *Annual Conference on "The International Migrant Day 18 December"* tanggal 01 Januari 2013
- c. *Workshop 2, For The Project on "Politics, Governance, Experiences and Responses to Flooding From The Local and Migrants Perspective in ASEAN"* tanggal 01 Januari 2013.

<sup>10</sup> ARCM, *Annual Report 2013*, Jakarta: ARCM, 2014, hal. 6 April 2014

- d. *Sustainable Solutions to The Displaced People Situation Along The Thai-Myanmar Border* 22 Maret 2012.
- e. *Seminar on Managing Labour Migration to Minimize Exploitation in Crisis Situation* 01 Januari 2012.
- f. *Conference on "On The Move : Critical Migration Themes in ASEAN"* 01 Januari 2012.
- g. *From "Contract Workers" to "Immigrant Spouses" : Cases of Thais in Taiwan* 01 Januari 2012.

Untuk memperkenalkan dan menambah wawasan masyarakat umum terhadap masalah perdagangan manusia Universitas Chulalongkorn melalui ARCM membangun pusat ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang mengoleksi buku, jurnal, dan konten multimedia yang terkait sehingga mudah diakses oleh seluruh kalangan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa judul buku yang merupakan dokumentasi dari ARCM.<sup>11</sup>

- a. *Armed Conflict, Internally Displaced Persons and Protection in kachin State, Myanmar* (2014) karya Zaw Lut.
- b. *Assesing Potential Changes in The Patterns of Myanmar Migrants and Their Impact on Thailand* (2013) karya Michiko Ito.

<sup>11</sup> Documentation Center dalam <http://www.asianthailand.com/documentcenter.php> diakses tanggal 6

- c. *Reaching The Unreached : The Role of Civil Society in Providing Access to Education for Migrant Children From Myanmar in Thailand* (2013) karya Kristine Misvaeligr Stenbeck.
- d. *Employment Practices and Working Conditions in Thailand's Fishing Sector* (2013) karya Max Tumon.
- e. *Labour migration Critical Issue for Thailand* (2013) karya H.E Phadermchai Sasomsub.

Melalui kerjasama dengan ARCM, pemerintah Thailand bisa lebih mudah untuk memberikan informasi dan pengetahuan pada masyarakat terkait perdagangan manusia. Pemerintah Thailand juga mendapatkan manfaat dari adanya proyek dan agenda yang dijalankan ARCM, yang dijadikan sebagai masukan dari akademisi untuk langkah-langkah lebih lanjut terkait penanganan perdagangan manusia.

## **B. Upaya Eksternal Yang Dilakukan Pemerintah Thailand**

### **1. Pemerintah Thailand Melakukan Kerjasama Internasional Dengan Negara Lain.**

Kerjasama dengan negara lain dengan skala internasional sangat diperlukan oleh pemerintah Thailand, mengingat perdagangan manusia merupakan tindak kriminal transnasional. Kasus ini menjangkau lintas batas negara dan membutuhkan penanganan dari beberapa negara.

Kerjasama antar negara terkait dengan kasus ini dapat dilakukan secara

bilateral (dua pihak) atau multilateral (banyak pihak). Dengan adanya kerjasama ini, Thailand dapat berkoordinasi dengan negara lain sebagai upaya menanggulangi perdagangan manusia yang terjadi. Berikut ini adalah beberapa kerjasama antar negara yang dilakukan oleh pemerintah Thailand :<sup>12</sup>

- a. Kerjasama pemerintah Thailand dan pemerintah Myanmar dalam *Cooperation to Combat Trafficking in Persons, especially Women and Children* (2009).
- b. Kerjasama pemerintah Thailand dan Pemerintah Vietnam dalam *Bilateral Cooperation for Eliminating Trafficking in Persons, especially Women and Children and Assisting Victims of Trafficking* (2008).
- c. Kerjasama pemerintah Thailand dan Pemerintah Laos dalam *Cooperation to Combat Trafficking in Persons, especially Women and Children* (2005).
- d. Kerjasama Melawan Perdagangan Manusia di Sub-wilayah Mekong Besar untuk *Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking* (COMMIT) 2004.
- e. Kerjasama pemerintah Thailand dan pemerintah Kamboja dalam *Bilateral Cooperation for Eliminating Trafficking in Children and Women and Assisting Victims of Trafficking* (2003).

- f. *US Supports International Law Enforcement Academy in Bangkok*
- g. *Thai American Law Enforcement Cooperation by FBI.*

## **2. Pemerintah Thailand Bekerjasama Dengan Organisasi Non-Pemerintah Internasional**

Kerjasama pemerintah Thailand dengan organisasi non-pemerintah internasional diperlukan karena pada dasarnya organisasi internasional menjangkau wilayah yang luas. Dengan adanya kerjasama ini, pemerintah Thailand dapat terbantu dan dapat mengikuti program yang dibuat oleh organisasi internasional guna melawan perdagangan manusia yang terjadi. Berikut ini adalah organisasi non-pemerintah internasional yang bekerja sama dengan pemerintah Thailand :<sup>13</sup>

### **a. *Alliance Anti Traffic (AAT).***<sup>14</sup>

Merupakan organisasi yang berdiri pada bulan Maret 2007 dengan kepentingan untuk memerangi perdagangan manusia di tingkat regional. Wilayah utama yang menjadi fokus sejak mereka berdiri adalah Laos, Vietnam, dan Thailand. *Goal* yang dicanangkan oleh organisasi ini adalah menghilangkan eksploitasi seksual dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan seksual dan prostitusi sebagai akibat dari perdagangan

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.



manusia. AAT memiliki beberapa program yakni pencegahan, perlindungan, reintegrasi, rehabilitasi, kegiatan sosial, yang mendukung aksi anti perdagangan manusia.

b. *Asia Regional Trafficking in Persons Project (ARTIP)*.<sup>15</sup>

Merupakan proyek inisiatif *anti-trafficking* yang digagas oleh pemerintah Australia. Proyek ini dicanangkan untuk membantu mencegah *human trafficking* di Asia Timur dengan cara memperkuat lembaga-lembaga peradilan nasional dan daerah. Pada tingkat nasional, ARTIP bekerjasama dengan penegak hukum, pengadilan, dan jaksa untuk mengidentifikasi dan menuntut kasus perdagangan manusia. Pada tingkat regional, proyek ini mendukung *Senior Officials Meeting on Transnational Crime* melalui sekretariat ASEAN.

c. *Center for the Protection of Children's Rights (CPCR)*.<sup>16</sup>

Merupakan lembaga swadaya masyarakat di Bangkok yang basis utamanya adalah untuk mencegah dan menghadapi segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran anak-anak di Thailand. CPCR menjalankan program untuk melayani dan melindungi anak-anak yang menjadi korban melalui pemantauan, investigasi, perawatan, reintegrasi, dan

---

<sup>15</sup> *Asia Regional Trafficking in Persons Project on Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade* dalam <http://aid.dfat.gov.au/countries/eastasia/regional/Pages/initiative-artip-project.aspx> diakses tanggal 12 Maret 2014

<sup>16</sup> *About Us on Center of The Protection of Children's Right* dalam <http://www.thechildrights.org/about> diakses tanggal 12 Maret 2014

pencegahan. CPRC memiliki empat proyek utama, yaitu Satuan Perlindungan Anak, *Gatehouse* (Baan Raek Rub), Pengobatan Hunian (Baan Oun Rak), dan Unit Anak dan Pengembangan Keluarga.

- d. *End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children* (ECPAT).<sup>17</sup>

Jaringan organisasi global yang bekerjasama untuk mencegah pelacuran anak, pornografi anak, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. ECPAT fokus pada upaya untuk menyelamatkan hak-hak dasar anak, sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan dapat memiliki rasa aman dari semua bentuk kejahatan atau eksploitasi seksual.

- e. *World Vision Foundation of Thailand* (WVFT).<sup>18</sup>

Merupakan organisasi non pemerintah yang bersifat internasional dan memiliki kemitraan dengan umat kristiani secara internasional. Organisasi ini memberikan bantuan untuk orang-orang miskin dan tertindas untuk mempromosikan transformasi manusia, pencarian keadilan, dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Beberapa misi WVFT diantaranya adalah pemberian bantuan darurat (konflik dan bencana alam), kemitraan dengan gereja (kontribusi transformasi spiritual dan

<sup>17</sup> *What We Do on ECPAT* dalam <http://www.ecpat.net/what-we-do> diakses tanggal 12 Maret 2014

<sup>18</sup> *Mission Statement on World Vision Foundation* dalam

social), pembentukan kesadaran publik (pemahaman dan pemberian informasi), dan lainnya.

f. *The Asia Foundation*.<sup>19</sup>

Organisasi pembangunan internasional yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kehidupan di seluruh kawasan Asia yang dinamis dan berkembang. Program yang dicanangkan oleh organisasi ini penanganan terhadap masalah-masalah yang ada di kawasan Asia, yang meliputi pemerintahan, pembangunan ekonomi, hukum, pemberdayaan perempuan, lingkungan, dan kerjasama regional. TAF juga memiliki program Buku Untuk Asia dan pertukaran profesional sebagai salah satu cara untuk mendorong pembangunan di Asia sebagai kawasan yang berkembang, damai, dan adil.

g. *Child Workers in Asia (CWA)*.<sup>20</sup>

Merupakan jaringan dari 78 organisasi dan kelompok pekerja anak yang bekerja mendukung anti eksploitasi pekerja anak di Asia. Mitra dari CWA berada di beberapa negara, diantaranya Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Thailand, Indonesia, dan Hongkong. Program yang dimiliki oleh organisasi ini yakni melakukan kegiatan advokasi, melobi untuk undang-undang

---

<sup>19</sup> *About The Asia Foundation* dalam <http://asiafoundation.org/about/> diakses tanggal 12 Maret 2014

<sup>20</sup> *Child Workers in Asia* dalam <http://www.childwatch.uio.no/research/child-labour-working-children/child-workers-asia.html> diakses tanggal 12 maret 2014

yang berkaitan dengan anak, melindungi anak-anak dalam konflik senjata dan melembagakan partisipasi anak. Prioritas dari CWA antara lain *Bonded Child Labour, Child Domestic Work, Internally Migrant and Trafficked Children*, dan *Education and Child Labour*.

h. *Migrant Assistance Program (MAP) Foundation*.<sup>21</sup>

Merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat migrant dari Burma yang tinggal dan bekerja di Thailand. MAP mengupayakan agar orang-orang Burma memiliki hak untuk tetap aman di negara asal mereka dan hak untuk bermigrasi dengan aman sebagai bagian dari hak asasi manusia. Organisasi ini juga memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi dengan detail dan mudah, serta berusaha untuk menghilangkan eksploitasi buruh di setiap sektor. MAP juga menciptakan ruang bagi perempuan migrant untuk mendapatkan hak dan mengasah kemampuan mereka. *MAP Community Radio* dan *Domestic Worker Campaign* adalah program yang dimiliki oleh organisasi ini.

i. *Music Television End Exploitation and Trafficking (MTV EXIT)*.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Who We Are on MAP Foundation* dalam [http://www.mapfoundationcm.org/eng/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2&Itemid=6](http://www.mapfoundationcm.org/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=6) diakses tanggal 12 Maret 2014

<sup>22</sup> *Who We Are on MTV EXIT* dalam <http://www.mtvexit.org/> diakses tanggal 12 Maret 2014

Merupakan kampanye melawan perdagangan manusia dan eksploitasi, melalui peningkatan kesadaran dengan mempromosikan perilaku positif dan aksi sosial. Bermitra dengan AusAID dan USAID, sasaran dari kampanye ini adalah kaum muda. MTV EXIT juga bekerjasama dengan selebriti dan orang berpengaruh di dunia untuk beberapa produk, seperti on-air-programme, iklan, drama, video klip, dan lainnya. Produk tersebut merupakan cara MTV EXIT untuk berkampanye dan menginformasikan pada anak-anak muda tentang perdagangan manusia. Satu bentuk kampanye yang sangat disukai kaum muda dan sudah dijalankan oleh organisasi ini adalah konser. Setidaknya sudah ada empat konser yang digelar di beberapa negara kawasan Asia Tenggara, yakni Vietnam (Hanoi, 26 Mei 2012), Indonesia (Bandung, 1 September 2012), Myanmar (8 Maret 2013), dan Thailand (Udon Thani 15 Maret 2014).

### **3. Pemerintah Thailand Bekerjasama dengan Agensi PBB**

Agensi PBB merupakan organisasi non-pemerintahan yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa. Setiap agensi memiliki program yang bersifat internasional. Program yang ada pada agensi PBB biasanya diikuti oleh banyak negara di dunia, bergantung pada kebutuhan

masing-masing negara. Pemerintah Thailand sudah terikat dengan beberapa kerjasama dengan agensi PBB, diantaranya :<sup>23</sup>

- a. *International Labour Organization* (ILO)
- b. *United Nations Children's Fund* (UNICEF)
- c. *United Nations, Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO)
- d. *United Nations Women's Fund* (UNIFEM)
- e. *United Nations High Commission for Refugees* (UNHCR)
- f. *United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking* (UNIAP)
- g. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC)

### **C. Pencegahan Perdagangan Manusia di Thailand**

Pencegahan adalah cara yang paling diterima secara internasional untuk mengatasi masalah perdagangan manusia. Pemerintah Thailand telah memperhatikan hal ini, mengalokasikan anggaran yang lebih besar, dan melakukan usaha-usaha melawan perdagangan manusia, khususnya dalam hal pencegahan. Banyak program pencegahan yang telah diimplementasikan secara aktif.

Menurut UU Anti Perdagangan Manusia, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia merupakan agen pemerintah yang menjadi

---

<sup>23</sup> *Key Actors in Human Trafficking in Thailand* dalam <http://www.no->

kunci utama dan berperan sebagai koordinator dalam mengumpulkan dan menyatukan usaha-usaha semua pihak yang terlibat dalam perlawanan terhadap perdagangan manusia. Pemerintah Thailand, dalam satu dekade terakhir ini, telah menempatkan kebijakan untuk melawan perdagangan manusia dan juga kebijakan terhadap obat-obat terlarang sebagai agenda utama pemerintah. Pemerintah Thailand telah menetapkan dua komite di level nasional, sesuai dengan UU Anti Perdagangan Manusia. Komite yang pertama adalah Komite Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia dan komite yang kedua adalah Komite Koordinasi dan Pengawasan Kinerja Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia.

Komite Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia adalah komite level tertinggi dan diketuai oleh Perdana Menteri. Anggotanya terdiri dari Deputi Perdana Menteri, tujuh menteri terkait lainnya<sup>24</sup>, dan empat staf ahli di bidang perdagangan manusia. Tugas dan fungsi utamanya adalah menyediakan rekomendasi kepada Kabinet terkait kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia dan terkait revisi undang-undang, peraturan, dan regulasi lainnya untuk perbaikan dalam melawan perdagangan manusia. Komite ini juga memiliki tanggung jawab dalam menetapkan strategi, langkah-langkah, dan pedoman untuk pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia.<sup>25</sup> Komite ini harus mengadakan

---

<sup>24</sup>Tujuh anggota komite lainnya adalah Minister of Defense, Minister of Foreign Affairs, Minister of Tourism and Sports, Minister of Social Development and Human Security, Minister of Interior, Minister of Justice, dan Minister of Labour.

<sup>25</sup>Wongchai Panichavong, *Op. Cit.* hal. 142.

sekurang-kurangnya tiga pertemuan setiap tahun sesuai amanat UU Anti Perdagangan Manusia.

Komite Koordinasi dan Pengawasan Kinerja Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia dikepalai oleh Deputi Perdana Menteri dan anggotanya terdiri dari Menteri Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia, jaksa agung, komisaris jenderal polisi, delapan sekretaris tetap dari delapan kementerian terkait, enam direktur jenderal, dan delapan staf ahli di bidang perdagangan manusia. Tugas dan fungsi utamanya adalah menyusun rencana-rencana untuk pencegahan dan perlawanan perdagangan manusia and mengawasi implementasi dari rencana, aturan, dan perundangan terkait, serta kinerja agensi pemerintah dan dinas terkait dalam pencegahan dan perlawanan terhadap perdagangan manusia. Kedua komite ini telah membentuk beberapa subkomite untuk menjalankan beragam tugas dan fungsi yang dibutuhkan dan melaporkan kembali kepada komite. Dampak umum yang dirasakan adalah masalah perdagangan manusia dan semua aspeknya bisa dijangkau secara langsung dan bisa ditangani oleh Perdana Menteri dan Kabinet.<sup>26</sup> Komite Koordinasi dan Pengawasan Kinerja Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia harus mengadakan sekurang-kurangnya enam pertemuan dalam satu tahun.

Melalui kedua komite ini, para pengambil kebijakan tertinggi di pemerintahan Thailand: Perdana Menteri, Menteri, Sekretaris Tetap, dan pegawai pemerintah senior lainnya, berhadapan langsung dan melawan



masalah perdagangan manusia sebagai agenda nasional prioritas tinggi dengan alokasi anggaran yang berlimpah dan didukung oleh beragam agen-agen pemerintah. Terlebih lagi, kedua komite ini memiliki manfaat dalam peningkatan kesadaran para pengambil kebijakan tertinggi terhadap pemahaman dan keseriusan masalah perdagangan manusia.

Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia memiliki tanggung jawab untuk mengusulkan program-program pencegahan kepada Komite Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia dan melaksanakan program-program tersebut. Banyak kampanye anti perdagangan manusia yang telah dilakukan dalam satu dekade terakhir. Namun, para korban perdagangan manusia cenderung lebih memercayai para pelaku, yang seringkali memiliki hubungan dengan keluarga korban atau tokoh-tokoh desa mereka, daripada kampanye-kampanye yang didengungkan oleh pemerintah. Banyak organisasi non-pemerintah juga telah melakukan usaha keras bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat di berbagai bagian negara Thailand yang rentan terhadap perdagangan manusia untuk mengampanyekan dan meningkatkan kewaspadaan bagi calon-calon korban potensial dan menyosialisasikan modus-modus yang digunakan oleh pelaku. Walaupun demikian, para pelaku masih saja dapat meyakinkan para korban bahwa mereka akan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih baik di luar negeri. Para pelaku juga membuat para korban percaya bahwa mereka tidak

Pendidikan adalah langkah efektif dalam pencegahan perdagangan manusia. Sekitar sepuluh tahun yang lalu, wajib belajar di Thailand telah ditingkatkan dari 6 tahun menjadi 9 tahun dengan 12 tahun pendidikan secara gratis diseluruh negeri.<sup>27</sup> Selain itu, pemerintah juga menyediakan pinjaman pendidikan dengan bunga sangat rendah bagi semua siswa yang mengalami kesulitan finansial dan memiliki keinginan untuk melanjutkan studi ke sekolah tinggi atau universitas. Siswa yang mengambil pinjaman tersebut memiliki kewajiban untuk membayar kembali secara mencicil setelah lulus dan memiliki pekerjaan dan penghasilan. Langkah ini membantu untuk menahan para wanita tetap berada di sekolah dan perguruan tinggi, mendorong mereka untuk terus mencari ilmu dan memiliki cita-cita yang tinggi. Wanita yang lebih berpendidikan memiliki kemungkinan yang kecil untuk tertipu oleh modus-modus yang digunakan oleh pelaku perdagangan manusia.

#### **D. Pemberantasan Perdagangan Manusia di Thailand**

Tahap penting selanjutnya adalah pemberantasan praktik-praktik perdagangan manusia yang telah ada. Tujuan pemberantasan ini adalah melemahkan dan melumpuhkan para pelaku perdagangan manusia dan jaringannya dengan memenjarakan mereka dan mencegah agar mereka tidak mengulangi kejahatan ini kepada korban lain dan juga disisi lain secara

pemberantasan perdagangan manusia tidaklah mudah dikarenakan beberapa kendala dalam prosesnya.

### **1. Proses Kriminalisasi Dalam Kasus-kasus Perdagangan Manusia**

Proses kriminalisasi dalam kasus perdagangan manusia sama dengan proses yang digunakan dalam penuntutan terhadap kasus kejahatan lainnya. Ketika pihak kepolisian atau petugas dari Departemen Investigasi Khusus menerima informasi dari Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia, Organisasi Nonpemerintah, korban, keluarga korban, atau siapa pun yang melaporkan bahwa seseorang telah dijual, operasi penyelamatan akan dilaksanakan untuk mengeluarkan korban dari TKP dan menangkap pelaku. Korban selanjutnya akan diwawancarai oleh kepolisian dan petugas dari kementerian terkait untuk menentukan apakah korban benar-benar menjadi korban perdagangan manusia. Setelah terbukti kebenarannya, korban akan dibawa ke rumah perlindungan dan dirawat oleh petugas disana. Korban kemudian akan diwawancarai lebih lanjut lagi untuk memperoleh informasi sehingga pihak berwajib dapat menangkap dan menuntut pelaku serta pihak terkait lainnya. Pelaku kemudian akan dituntut di pengadilan sesuai jadwal sidang. Namun, sebagaimana yang juga terjadi di negara lain, proses persidangan ini memakan waktu yang cukup lama, mungkin hingga satu atau dua tahun disebabkan antrian kasus yang menumpuk yang menunggu untuk disidang. Faktor waktu ini adalah halangan besar dalam proses pemberantasan perdagangan manusia

Saksi terpenting dalam kasus perdagangan manusia adalah si korban itu sendiri, yang menyaksikan kekerasan dan eksploitasi secara langsung. Pihak penuntut membutuhkan testimoni korban dalam pengadilan untuk meyakinkan hakim atas peristiwa yang terjadi. Dengan adanya testimoni korban, hakim tidak akan ragu dalam memvonis pelaku dengan hukuman berat. Namun, ada beberapa faktor yang menghambat korban untuk memberikan testimoni di pengadilan. Kebanyakan korban memiliki tingkat pendidikan yang rendah, kurang terbuka wawasannya, dan berasal dari desa kecil. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti proses hukum yang kompleks dan cenderung tidak ingin terlibat dalam proses yang rumit dan panjang dalam lingkungan yang penuh tekanan seperti dalam pengadilan. Korban eksploitasi seksual juga seringkali merasa malu atas apa yang mereka alami dan hanya ingin melupakan kejadian tersebut secepatnya dan melanjutkan kehidupannya secara normal lagi. Keharusan untuk menunggu dalam jangka waktu yang lama sebelum mereka bisa memberikan testimoni dan melanjutkan kehidupan mereka benar-benar menyusahakan sehingga banyak korban yang memilih untuk tidak membantu.

Faktor penting lainnya adalah fakta bahwa korban memiliki rasa takut yang amat sangat terhadap pelaku. Korban memercayai bahwa pelaku merupakan orang yang berpengaruh atau merupakan anggota kelompok kriminal yang suatu saat dapat melukai mereka dan keluarga mereka. Walaupun pihak berwenang dapat mengatur upaya perlindungan

terhadap korban, tetap saja korban tidak percaya sepenuhnya akan keamanannya dan keluarganya. Jika pihak berwenang tidak mampu meyakinkan korban untuk bekerja sama dan memberikan testimoni di pengadilan, kasus akan berakhir gagal dan pelaku dibebaskan karena tidak adanya bukti yang mendukung.

## **2. Hambatan dan Tantangan Dalam Penanganan Kasus-Kasus Perdagangan Manusia**

Menurut pendapat jaksa di Thailand, yang telah berpengalaman bertahun-tahun mengurus kasus-kasus, kasus perdagangan manusia lebih sulit ditangani daripada kasus perdagangan narkoba. Dalam kasus perdagangan narkoba, barang bukti yang terpenting adalah obat-obatan terlarang itu sendiri, yang karakteristiknya tidak pernah berubah selama proses penangkapan hingga persidangan. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan uji laboratorium terhadap obat yang disita untuk membuktikan bahwa obat tersebut benar-benar tergolong ke dalam narkoba. Narkoba tidak membutuhkan makanan, pakaian, tempat perlindungan, perawatan medis, dan kebutuhan dasar manusia lainnya. Obat itu hanya membutuhkan ruang kecil yang aman dan dia akan tetap disana selama mungkin hingga waktu persidangan. Ketika waktu persidangan tiba, jaksa menghadirkan obat itu dan hasil uji laboratorium dihadapan para hakim.

Obat tidak akan pernah hancur dan selalu akan dibungkus rapat karena

Menangani kasus perdagangan manusia jauh lebih sulit. Pertama kali, para petugas harus berusaha sebaik-baiknya untuk memperoleh kepercayaan dari para korban untuk mengungkapkan cerita yang sebenarnya. Lebih jauh lagi, para petugas juga harus meyakinkan dan mendorong para korban untuk mau bekerja sama dalam proses investigasi, penuntutan, dan persidangan. Para petugas harus menyediakan makanan, tempat tinggal, pakaian, perawatan medis, keamanan, dan kebutuhan lainnya. Sebagai manusia, mereka tidak bisa sabar menunggu lama di tempat perlindungan hingga waktu persidangan. Mereka dan keluarga mereka bisa saja diancam atau disuap oleh pelaku dan jaringannya sehingga mereka kabur dari tempat perlindungan atau memberikan kesaksian palsu selama persidangan.

Menjalani pemeriksaan yang panjang, berat, dan saling bergantian dari pihak jaksa penuntut dan pengacara bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Oleh karena itu, bisa dipahami alasan yang membuat para korban enggan untuk bekerja sama dan hanya ingin melupakan kejadian yang telah mereka alami secepatnya. Petugas tidak bisa memaksa mereka untuk bekerja sama dan akhirnya kasus pun dibatalkan karena tidak adanya bukti.

Untuk memecahkan masalah masa tunggu yang lama hingga waktu pemberian testimoni di persidangan, UU Anti Perdagangan Manusia menyediakan beberapa solusi. Undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk meminta testimoni korban sebelum kasus

diajukan ke pengadilan. Pihak pengadilan akan menyimpan testimoni korban hingga pelaku dituntut dan persidangan dimulai. Kemudian, pengadilan akan mengambil kembali testimoni korban dan menggunakannya sebagai testimoni saksi dalam kasus tersebut. Pasal 31 UU Anti Human Trafficking menyatakan :<sup>28</sup>

*“In case of necessity for the benefit of prevention and suppression of trafficking in person, before prosecuting the offender to the Court, the public prosecutor by himself or by receiving a request from an inquiry official, may bring the trafficked person or a witness to the Court and file a petition specifying all the facts alleged to have been committed and the necessary cause why the testimony must be taken promptly.”* (Jika diperlukan demi manfaat pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, sebelum menuntut pelaku ke pengadilan, jaksa penuntut secara pribadi atau atas permintaan resmi, dapat membawa korban atau saksi ke pengadilan dan mengajukan permohonan yang menjelaskan semua fakta yang dituduhkan benar-benar telah dilakukan dan sebab utama mengapa testimoni harus dilakukan secepatnya.)

*“In case the initiation to testify in Court is of the trafficked person or witness, after such person informed his intention to the public prosecutor, the public prosecutor shall immediately submit a petition to the Court.”* (Dalam hal inisiatif untuk memberikan testimoni di pengadilan datang dari korban atau saksi, setelah inisiator mengungkapkan keinginannya kepada jaksa penuntut, jaksa penuntut harus segera mengajukan permohonan ke pengadilan)

*“Having received the petition under paragraph one or two, the Court shall take the testimony of the witness promptly. During the taking testimony, if an interested person in the case files a petition to the Court citing a reason or necessity to cross-examine or to appoint a counsel for cross-examination, the Court may grant permission...”* (Setelah menerima permohonan seperti yang disebutkan dalam paragraf satu atau dua, pengadilan harus mengambil testimoni saksi secepatnya. Selama proses pengambilan testimoni, jika seseorang dalam kasus mengajukan permohonan kepada pengadilan yang menyebutkan alasan atau perlunya dilakukan pemeriksaan silang atau untuk menunjuk pengacara agar melakukan pemeriksaan silang, pengadilan dapat mengizinkan.)

*"If the alleged offender is indicted later as a defendant with the charge of any offence stipulated in Chapter 1, the deposited testimony of the witness shall be admitted as evidence in the trial and in making judgment of that case."* (Jika si tersangka dikemudian waktu ditetapkan sebagai terdakwa dengan dakwaan melakukan tindak kejahatan yang ditetapkan dalam Bab I, testimoni saksi yang telah disimpan sebelumnya harus disertakan sebagai bukti dalam persidangan dan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus tersebut.)

Melalui langkah ini, korban tidak lagi perlu menunggu lama untuk memberikan testimoni. Korban yang berasal dari luar negeri dapat dipulangkan ke negara asalnya setelah testimoni mereka diambil oleh pengadilan. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat meminta kompensasi terhadap korban kepada pelaku. Kompensasi itu kemudian dibayarkan melalui kerjasama antara negara tempat sidang dilakukan dengan negara asal korban. Dalam kasus eksploitasi buruh, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia mengajukan komplain atas nama korban kepada pengadilan arbitrase untuk menagih upah yang belum dibayarkan oleh pihak pengusaha.

Dalam kasus korban mau bekerja sama dengan pihak berwenang dan hadir dalam persidangan sebagai saksi mata, ada kecenderungan yang tinggi pelaku perdagangan manusia akan dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, usaha untuk meyakinkan dan mendorong korban untuk mau bekerja sama dengan pihak berwenang adalah kunci sukses dalam melawan perdagangan manusia. Namun, mendapatkan bantuan korban bukanlah

... dan oleh karena itu, langkah ini merupakan prioritas tertinggi dalam



korban. Oleh sebab itu, pelaku akan mencoba segala cara untuk menghalang-halangi korban untuk menjadi saksi dalam kasusnya.

Pada salah satu kasus, dua orang wanita telah ditipu untuk pergi ke London untuk bekerja di restoran Thailand. Ketika tiba di London, mereka disekap dan dipaksa untuk berfoto tanpa busana. Mereka diancam oleh pelaku jika mencoba kabur dan melapor kepada polisi, foto-foto mereka akan disebar di desa asal mereka sehingga semua warga desa tahu bahwa mereka selama ini bekerja di bisnis prostitusi. Walaupun demikian, kedua wanita itu berhasil melarikan diri dan mencari pertolongan di Kedutaan Besar Thailand di London. Kedutaan lalu mengirimkan mereka kembali ke Thailand dan menghubungi Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia untuk menerima dan menjaga mereka setibanya di bandara. Kemudian, kedua wanita ini memberikan kesaksian kepada polisi, tetapi tidak mau membantu lebih jauh lagi dan tidak ingin mengidentifikasi pelaku. Oleh karena itu, kasus mereka terpaksa dibatalkan dan mereka dipulangkan kembali ke rumah masing-masing.<sup>29</sup>

Menurut prosedur standar Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia, jika tidak mau bekerja sama dan tidak ingin mengidentifikasi pelaku, korban, yang umumnya warga asing, akan dibawa ke tempat perlindungan. Disana, pekerja sosial menjelaskan kepada korban tentang hak-hak mereka dan manfaat yang didapat seperti

perlindungan, kompensasi, gaji yang belum terbayar, visa legal, dan ijin kerja, dengan harapan dapat membujuk korban untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan menghukum pelaku. Jika tidak dihukum, pelaku akan terus mencari korban-korban berikutnya dan melanjutkan lingkaran kejam perdagangan manusia. Solusi yang terbaik dan paling efisien adalah menangkap, menuntut, dan menghukum pelaku dengan sangat berat. Dalam hal korban tetap tidak mau bekerja sama, prosedur pemulangan tetap dijalankan.

Pemulangan korban ke negara asalnya merupakan aspek yang penting dari proses perlindungan. Untuk menjamin korban sampai ke rumah masing-masing dengan selamat, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia telah menandatangani beberapa perjanjian kerjasama untuk melawan perdagangan manusia dengan negara-negara tetangga seperti, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Dengan demikian, proses pemulangan dikoordinasikan dengan baik antara agensi terkait dari kedua negara yang terlibat dengan menjaga keamanan korban sebagai prioritas utama.

### **3. Kesenjangan dalam Kerjasama antara Negara Sumber dan Negara Tujuan Perdagangan Manusia.**

Salah satu tantangan utama dalam pemberantasan perdagangan manusia adalah minimnya koordinasi diantara pihak-pihak yang berwenang dari negara-negara terkait. Seringkali ketika korban telah diselamatkan dan

pelaku telah ditangkap di negara tujuan, tidak ada informasi kepada negara asal. Sehingga akhirnya, pelaku tidak ditahan dan dituntut di negara asalnya. Sebaliknya ketika korban pulang ke negara asal dengan usahanya sendiri dan melaporkan tentang perdagangan manusia dan eksploitasi yang telah dialaminya kepada petugas di negara asalnya, tidak ada informasi kepada negara tujuan. Kadangkala informasi dibagikan kepada negara-negara yang terlibat, tetapi tanpa adanya detail terhadap korban, pelaku, dan kasus eksploitasi yang terjadi sehingga pihak berwenang tidak memiliki cukup informasi untuk menangkap pelaku atau menginisiasi investigasi terhadap kasus tersebut. Kerjasama internasional, oleh karena itu, menjadi sangat penting dan memainkan peran krusial dalam membasmi seluruh sindikat perdagangan manusia.

Dalam menjalankan kerjasama internasional yang efektif untuk memberantas perdagangan manusia, sebuah perjanjian sangat dibutuhkan sehingga pihak-pihak yang bawenang di kedua negara dapat berbagi informasi, bertindak bersama-sama, mengungkapkan dan menyediakan bukti dalam kasus, memberikan ijin, ekstradisi, atau melakukan tuntutan secara simultan di kedua negara dengan menggunakan saksi dan bukti yang sama. Perjanjian antara kedua negara ini dapat berbentuk pakta, nota kesepahaman, atau bentuk lain yang bisa memberikan keberhasilan dalam kerjasamanya. Selain perjanjian kerjasama, mengenal mitra kita di negara lain dan saling mempercayai menjadi faktor penting dalam melawan sindikat perdagangan

Kerjasama internasional harus dilaksanakan melalui jalur formal dan informal. Dalam investigasi, yang membutuhkan kecepatan dalam prosesnya, kerjasama informal dapat dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk segera menangkap pelaku atau menyediakan bantuan ke negara mitra. Namun, ketika dokumen atau bukti formal dibutuhkan untuk persidangan, kerjasama formal dalam bentuk MLA (*Mutual Legal Assistance*) merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh bukti yang dibutuhkan dari negara mitra. Oleh karena itu, kerjasama internasional yang erat sangatlah vital dalam memberantas perdagangan manusia internasional.

Ekstradisi merupakan cara lain yang bisa digunakan untuk menahan pelaku. Walaupun pada umumnya negara yang menganut Hukum Perdata tidak mengekstradisi warga negaranya sendiri untuk dijatuhi hukuman di negara lain, mereka masih menjatuhi hukuman bagi warga negaranya yang melakukan tindakan perdagangan manusia daerah yuridiksi negara lain. Namun banyak contoh kejadian pelaku yang bukan warga dari negara yang meminta ekstradisi, bisa diekstradisi. Menurut kasus-kasus yang telah terjadi, pelaku cenderung memiliki kewarganegaraan yang sama dengan korbannya. Kebanyakan mucikari merupakan korban perdagangan manusia juga sebelumnya yang dipaksa melakukan prostitusi. Mereka telah cukup lama